

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA

#### 2.1 Ekonomi Makro

##### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan. Target pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu saja berbeda, hal ini dikarenakan potensi ekonomi di wilayah berbeda-beda sehingga kebijakan pemerintah untuk mengaturnya pun juga berbeda, disesuaikan dengan potensi di setiap wilayah. Dalam konteks regional, kesejahteraan masyarakat tersebut diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi setiap penduduknya. Idealnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk Peningkatan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi regional dan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi. Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan

atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut Pengeluaran.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berbagai inovasi dan teknologi juga semakin di tingkatkan guna mengintensifkan pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut. Penggunaan teknologi dimaksud dengan tetap memperhatikan lingkungan, kearifan local dan budaya setempat yang positif dalam melancarkan proses pembangunan.

Umumnya daerah yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan daerahnya. Karena itu ketersediaan sumber daya alam menjadi salah satu jaminan dalam proses menuju keberhasilan pembangunan. Penemuan – penemuan sumber daya alam yang baru juga merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi.

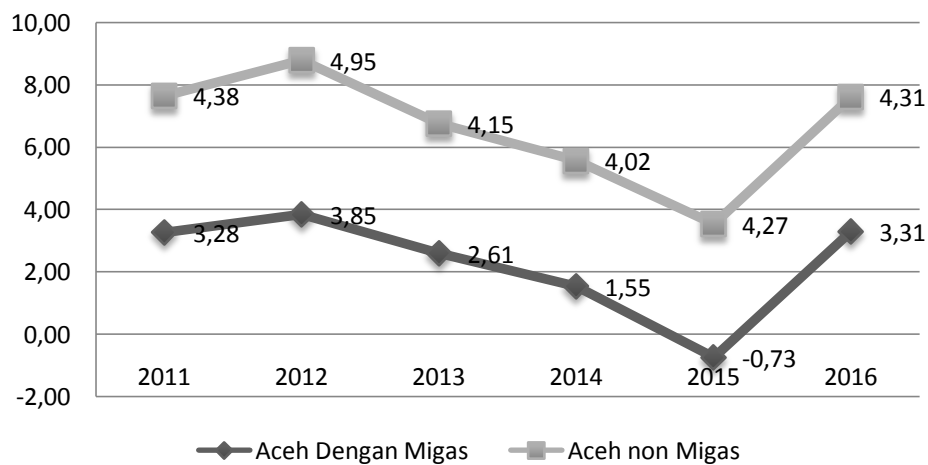
Disamping sumber daya alam, sumber daya manusia turut menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena cepat atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan yang selayaknya mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk melaksanakan proses dari pembangunan tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat khususnya di bidang teknologi, memberi dampak positif bagi proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya penggantian dalam memproduksi barang yang asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin yang canggih dan modern yang tentunya akan lebih efisien dan lebih cepat dalam menghasilkan produk, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh budaya setempat, karena budaya membentuk karakter sumber daya manusia yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan. Budaya kerja yang positif akan memberi dampak yang positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang. Dibawah ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh secara grafik selama 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Aceh  
(dalam persentase)



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Pada gambar 2.1 terlihat grafik pertumbuhan ekonomi Aceh selama lima tahun terakhir, baik pertumbuhan ekonomi dengan migas maupun pertumbuhan ekonomi non migas. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas mengalami peningkatan pada sebesar 3,31 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi tanpa migas meningkat sebesar 4,31 persen pada periode yang sama.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tumbuhnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Komponen PMTB tumbuh signifikan sebesar 11,79 persen dengan kontribusi terhadap PDRB Aceh sebesar 37,76 persen. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi adanya proyek pembangunan multiyear berupa pembangunan jalan, jembatan, tugu, landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman, juga pembelian barang-barang modal lainnya. Peningkatan komponen konsumsi LNPRT secara signifikan sebesar 9,46 persen banyak dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan partai politik dan lembaga politik menjelang persiapan Pilkada 2017. Meski demikian, kontribusi dari konsumsi LNPRT ini masih tergolong sangat kecil terhadap PDRB Aceh yaitu sebesar 1,99 persen.

Sementara itu pada komponen pengeluaran terjadi penurunan signifikan pada komponen konsumsi pemerintah, baik secara kolektif yaitu sebesar 15,85 persen maupun secara individu yakni sebesar 9,57 persen. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh pemotongan anggaran baik APBA maupun APBN. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Aceh sebesar 21,98 persen.

Ekspor luar negeri Aceh mengalami penurunan signifikan sebesar 69,87 persen yang diakibatkan oleh menurunnya ekspor barang hingga mencapai 87,87 persen, sedangkan ekspor jasa masih tumbuh positif. Komponen Impor Luar Negeri yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB turun sebesar 33,97 persen, hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan masyarakat Aceh terhadap barang dan jasa luar negeri lebih rendah dari periode sebelumnya. Kontribusi dari komponen ekspor dan impor luar negeri masih minim terhadap PDRB, hanya sebesar 0,72 persen dari ekspor dan 1,56 persen dari impor. (Sumber: Publikasi BPS Prov. Aceh)

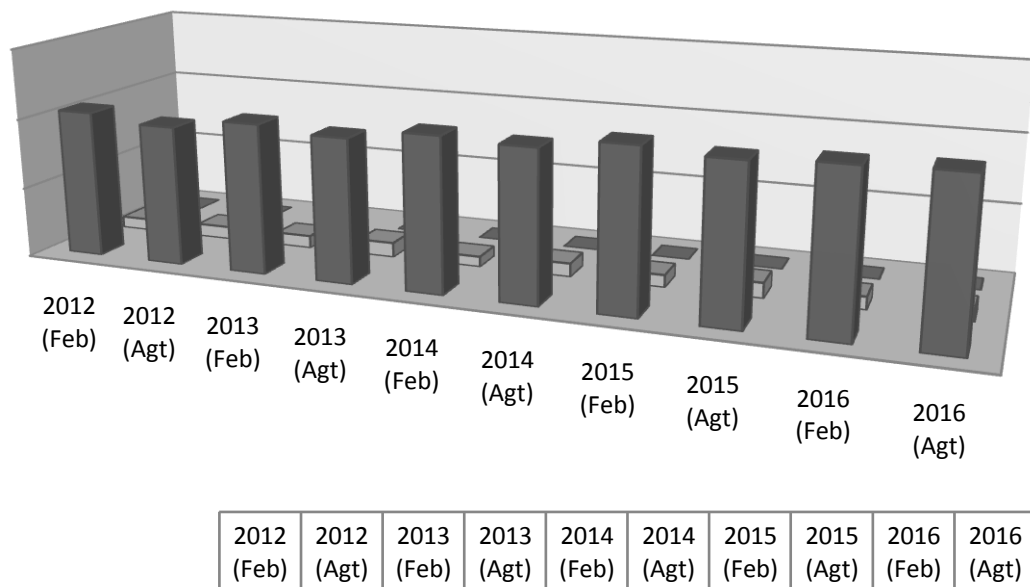
### 2.1.2. Perkembangan Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jumlah pengangguran diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada didalam angkatan kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran terus menjadi isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan, berbagai terobosan dan kebijakan terkait hal ini telah dilakukan pemerintah untuk memperkecil tingkat pengangguran dan mengakomodir tenaga kerja potensial. Masuknya investor diharapkan pula berdampak besar dalam mengurangi angka pengangguran provinsi Aceh.

Gambar 2.2  
Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh  
(dalam rupiah)

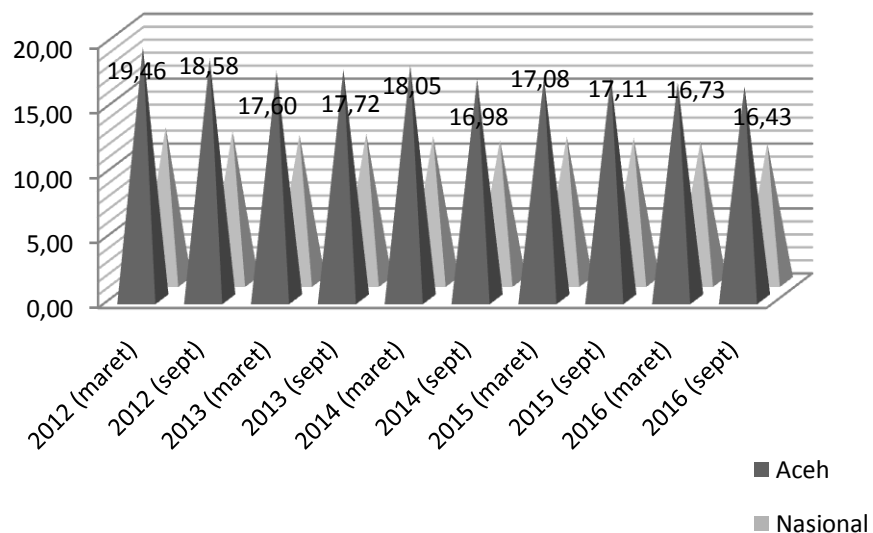


Sumber : BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 2.2, komposisi angkatan kerja, pengangguran dan persentase pengangguran di provinsi Aceh, pada bulan Agustus 2016, sebanyak 2.257.943 jiwa penduduk provinsi Aceh termasuk sebagai angkatan kerja. Jumlah ini meningkat sebanyak 75 ribu. Penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang termasuk ke dalam pengangguran. Pada Agustus 2016, jumlah pengangguran sebanyak 170.898 atau sebesar 7,57 persen dari angkatan kerja. Jumlah pengangguran ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 8,13 persen pada tahun 2015.

### 2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Gambar 2.3  
Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan Gambar 2.3, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh menunjukkan penurunan selama periode 2012 sampai dengan 2016. Dilihat dari angka kemiskinan per tahunnya, angka kemiskinan Aceh masih di atas angka rata-rata kemiskinan Nasional, namun dilihat dari persentase penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh lebih signifikan apabila dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan Nasional.

Pada September 2015 Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Aceh sebesar 17,11%, dan pada September 2016 persentase penduduk miskin turun menjadi 16,43%.

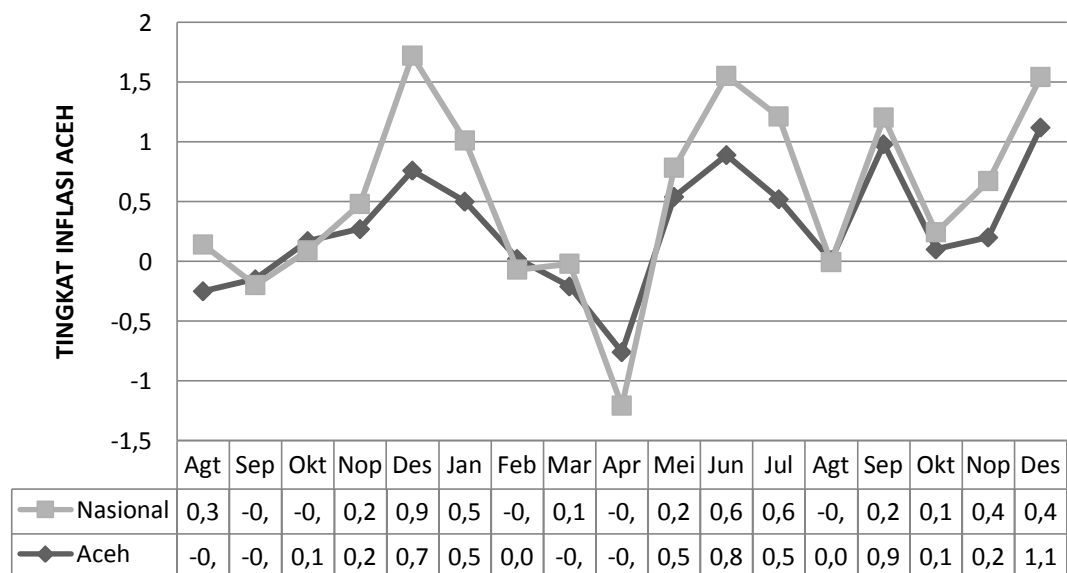
Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang terus ada di setiap negara, terutama negara berkembang. Mengingat tingkat kemiskinan yang lebih terkonsentrasi di pedesaan atau gampong, maka Pemerintah Aceh, sejak tahun 2009 telah meluncurkan Program Bantuan Keuangan Peumakmoe Gampong (BKPG) yang bertujuan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan bekerja, menurunkan jumlah penduduk miskin di gampong dan juga bertujuan meningkatkan kemampuan kemandirian lembaga gampong, meningkatkan kemandirian, swadaya masyarakat, dan gotong royong, serta meningkatkan kinerja aparat gampong dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah pedesaan/gampong.

### 2.1.4 Perkembangan Tingkat Inflasi Aceh

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Indeks harga Konsumen (IHK) merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat/ laju inflasi. IHK juga merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen.

Gambar 2.4  
Tingkat Inflasi Provinsi Aceh 2 (Dua) Tahun Terakhir



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Gambar 2.4 menunjukkan secara agregat tingkat inflasi Provinsi Aceh dari bulan Agustus 2015 sampai bulan Desember 2016. Inflasi tertinggi di Provinsi Aceh terjadi pada bulan Desember 2016 dengan tingkat inflasi 1,12 persen, sementara itu terjadi deflasi pada bulan Maret dan April 2016 secara berturut-turut. Dengan angka deflasi bulan Maret sebesar -0,20 persen dan April sebesar -0,70 persen.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menjamin kesehatan rakyat, serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Aceh merumuskan berbagai kebijakan penting dan strategis dalam berbagai sektor, baik kebijakan ditingkat usaha kecil menengah maupun ditingkat investasi berskala nasional dan internasional. Disamping itu pemerintah juga merumuskan kebijakan keuangan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh meliputi kebijakan keuangan di bidang Penerimaan/Pendapatan (*revenue policy*). Kebijakan pendapatan terkait dengan pendapatan Aceh yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan, pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan pajak dan retribusi tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Pendapatan Aceh dalam struktur APBA merupakan elemen yang sangat penting peranannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan pelayanan bagi masyarakat Aceh.

Kebijakan Belanja, dalam kebijakan belanja Pemerintah Aceh, anggaran belanja diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam penggunaannya, harus tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas serta sesuai dengan prioritas pembangunan.

Kebijakan Pembiayaan, dalam menetapkan kebijakan pembiayaan Pemerintah Aceh, diterapkan kebijakan berimbang. Artinya penerimaan pembiayaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh. Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh secara umum dapat dilihat dari perkembangan APBA dari tahun ke tahun.

Gambaran APBA periode lima tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1-APBA TA 2012-2016**  
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TA 2012		TA 2013		TA 2014		TA 2015		TA 2016	
	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%	ANGGARAN	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>8.683.092,40</b>	<b>100,00</b>	<b>10.471.540,77</b>	<b>100,00</b>	<b>11.539.505,69</b>	<b>100,00</b>	<b>11.941.681,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12.551.166,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>804.284,99</b>	<b>9,26</b>	<b>1.167.694,48</b>	<b>11,15</b>	<b>1.849.214,28</b>	<b>16,03</b>	<b>2.078.154,53</b>	<b>17,40</b>	<b>2.057.481,53</b>	<b>16,39</b>
Pajak Aceh	622.705,83	7,17	690.468,22	6,59	985.045,44	8,54	1.228.199,45	10,28	1.219.985,57	9,72
Retribusi Aceh	21.095,69	0,24	-	-	20.000,00	0,17	4.993,75	0,04	11.802,50	0,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	102.000,00	1,17	102.000,00	0,97	135.178,10	1,17	166.500,00	1,39	201.085,95	1,60
Zakat/Infaq	8.961,71	0,10	10.000,00	0,10	10.000,00	0,09	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	49.521,76	0,57	365.226,26	3,49	698.990,74	6,06	678.461,33	5,68	624.607,51	4,98
<b>Pendapatan Dana Perimbangan</b>	<b>1.940.522,48</b>	<b>22,35</b>	<b>2.563.800,26</b>	<b>24,48</b>	<b>2.399.219,01</b>	<b>20,79</b>	<b>1.672.168,78</b>	<b>14,00</b>	<b>1.670.711,09</b>	<b>13,31</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	263.467,97	3,03	250.706,19	2,39	283.930,08	2,46	345.691,22	2,89	225.938,76	1,80
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	175.508,35	2,02	101.571,93	0,97	-	-	-	-	25.650,84	0,20
Dana Alokasi Umum	911.080,71	10,49	1.092.445,52	10,43	1.201.612,79	10,41	1.237.894,99	10,37	1.263.870,99	10,07
Dana Alokasi Khusus	50.413,71	0,58	75.148,51	0,72	72.953,79	0,63	88.582,57	0,74	155.250,50	1,24
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi	540.051,74	6,22	1.043.928,11	9,97	840.722,35	7,29	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>5.938.284,93</b>	<b>68,39</b>	<b>6.740.046,03</b>	<b>64,37</b>	<b>7.291.072,40</b>	<b>63,18</b>	<b>8.191.358,19</b>	<b>68,59</b>	<b>8.822.973,43</b>	<b>70,30</b>
Hibah	-	-	3.255,26	0,03	3.619,85	0,03	66.230,90	0,55	8.837,50	0,07
Dana Penyesuaian	461.996,17	5,32	455.116,37	4,35	463.066,04	4,01	1.067.370,32	8,94	1.106.918,99	8,82
Dana Otonomi Khusus	5.476.288,76	63,07	6.222.785,78	59,43	6.824.386,51	59,14	7.057.756,97	59,10	7.707.216,94	61,41
Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya	-	-	58.888,62	0,56	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA ACEH</b>	<b>9.711.938,65</b>	<b>100,00</b>	<b>11.926.206,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12.939.689,74</b>	<b>100,00</b>	<b>12.749.671,57</b>	<b>100,00</b>	<b>12.874.631,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>3.712.038,65</b>	<b>38,22</b>	<b>4.011.035,52</b>	<b>33,63</b>	<b>5.785.027,57</b>	<b>44,71</b>	<b>5.725.422,68</b>	<b>44,91</b>	<b>6.099.499,83</b>	<b>47,38</b>
Belanja Pegawai	884.528,54	9,11	910.231,01	7,63	949.853,17	7,34	934.062,28	7,33	951.066,20	7,39
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	1.153.098,55	11,87	1.324.796,52	11,11	742.147,20	5,74	647.557,70	5,08	1.182.147,25	9,18
Belanja Bantuan Sosial	557.208,05	5,74	358.476,75	3,01	342.895,10	2,65	258.181,80	2,03	240.930,87	1,87
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	271.000,00	2,79	275.000,00	2,31	300.000,00	2,32	503.280,08	3,95	659.792,10	5,12
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	696.203,51	7,17	819.020,06	6,87	3.425.748,78	26,47	3.348.827,21	26,27	3.045.563,41	23,66
Belanja Tidak Terduga	150.000,00	1,54	323.511,18	2,71	24.383,32	0,19	33.513,61	0,26	20.000,00	0,16
<b>Belanja Langsung</b>	<b>5.999.900,00</b>	<b>61,78</b>	<b>7.915.170,96</b>	<b>66,37</b>	<b>7.154.662,17</b>	<b>55,29</b>	<b>7.024.248,89</b>	<b>55,09</b>	<b>6.775.132,11</b>	<b>52,62</b>
Belanja Pegawai	325.705,93	3,35	472,62	0,00	544.060,34	4,20	465.901,30	3,65	455.435,83	3,54
Belanja Barang dan Jasa	4.603.136,54	47,40	6.131.495,90	51,41	3.965.245,37	30,64	4.433.791,81	34,78	3.741.442,21	29,06
Belanja Modal	1.071.057,53	11,03	1.783.202,44	14,95	2.645.356,46	20,44	2.124.555,78	16,66	2.578.254,07	20,03
<b>PEMBIAYAAN</b>										
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.035.846,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.931.663,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.139,06</b>	<b>100,00</b>	<b>916.943,24</b>	<b>100,00</b>	<b>328.465,89</b>	<b>100,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	1.035.846,25	100,00	1.931.663,71	100,00	1.400.139,06	100,00	916.943,24	100,00	328.465,89	100,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.953,18</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000,00	100,00	4.850,00	100,00	-	-	108.953,18	100,00	50.000,00	100,00
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sumber pendapatan dalam struktur APBA adalah dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil Penyertaan Modal Aceh, serta Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dalam kelompok Pendapatan Asli Aceh. Kemudian ada Otonomi Khusus dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan



Aceh yang Sah, dilanjutkan dengan Tambahan Dana Migas dan Dana Alokasi Umum dalam kelompok Pendapatan Dana Perimbangan.

Komposisi pendanaan program dan kegiatan pemerintahan Dalam periode tahun anggaran 2012 sd 2016, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 yaitu pendapatan dari Pajak Aceh dianggarkan rata-rata sebesar 8,46%, diikuti oleh Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 10,35%, selanjutnya Dana Otonomi Khusus yang masih mendominasi dengan rata-rata sebesar 60,43% serta jenis penerimaan lainnya sebesar 21,05%.

Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Aceh atau PAA dianggarkan sebesar 17,40%, sementara tahun 2016 PAA dianggarkan sebesar 16,39%. Penerimaan Dana Otonomi Khusus cenderung menurun dari tahun 2012 sebesar 63,07% menjadi 59,43%, 59,14% dan 59,10% pada tiga tahun berikutnya berturut-turut, dan selanjutnya pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 61,41%. Sementara itu Dana Bagi Hasil cenderung menurun, diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang dengan belum adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru.

Pendapatan tersebut di atas digunakan untuk mendanai Belanja Langsung rata-rata sebesar 52,62%, serta Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 47,38% untuk periode tahun 2016. Belanja Langsung dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal masing-masing sebesar 29,06% dan 20,03%, sementara sisanya untuk belanja Pegawai. Alokasi Belanja Barang dan Jasa sebagiannya masih merupakan belanja barang modal yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota berupa bangunan gedung, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya yang dianggarkan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA**

Prioritas pembangunan untuk Provinsi Aceh dijabarkan dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, kesepuluh prioritas pembangunan tersebut yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Keberlanjutan Perdamaian; (3) Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya; (4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian; (5) Penanggulangan Kemiskinan; (6) Pendidikan; (7) Kesehatan; (8) Infrastruktur yang terintegrasi; (9) Sumber Daya Alam berkelanjutan; dan (10) Masalah Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Mengacu pada beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan Aceh diarahkan kepada sektor investasi dan produksi dengan penguatan pada fungsi ekonomi. Maka penetapan prioritas pada sektor ketahanan pangan dengan nilai tambah pada produk pertanian, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terintegrasi merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Aceh di masa yang akan datang.

Disamping prioritas di atas, dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang pelaksanaan Syariat Islam di

Provinsi Aceh, pemerintah terus memprioritaskan pembangunan dalam bidang keagamaan, baik program-program penguatan akidah maupun program-program penguatan kapasitas keilmuan syariah. Juga melanjutkan keberlangsungan perdamaian pasca konflik dengan mengimplementasikan amanat MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA dilandasi pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2016 yang mengacu pada RKPA tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2016. RKPA menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh untuk menyusun dan mengevaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2016.

Keberhasilan program-program pemerintah dapat diukur dengan persentase penyerapan anggaran, meskipun demikian keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dimaksud. Program kegiatan pemerintah yang berhasil juga dapat dilihat dari *outcome* atau dampak dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.